

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta KUHPperdata.

2. Dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperlukan penjelasan yang nyata dan terinci bagaimana kedudukan si penanggung dalam penanggungan yang tertanggungnya sedang dalam keadaan pailit untuk menjelaskan secara jelas apakah penanggungnya dapat dimohon pailit atau tidak, jika dapat maka diberikan peraturan mengenai apa syaratnya, kapan waktunya, bagaimana tata caranya agar tidak terjadi kebingungan bagi para pihak yang sedang dalam keadaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul R. Salaiman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Mandar Maju, 2015)

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010)

Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015)

- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002)
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009)
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2000)
- J. Satrio, *Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002)
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002)
- Syamsudin Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta : Tatanusa, 2012)
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, (Malang : UMM Press, 2012)
- Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2018)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rakesarasin, 2012)
- S. Wojawasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1985)
- Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- J.B. Huizink, *Insolventie, Pusat Studi Hukuk dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2004)
- Sutan Remi Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan*

- Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016)
- Kartini Muljadi, *Pengertian dan Prinsip-Prinsip Umum Hukum Kepailitan*, (Bandung: Alumni, 2001)
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018)
- I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Terbatas*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2006)
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2007)
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Adib Bahari, *Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Suparji, *Transformasi Badan Hukum di Indonesia*, (Jakarta : UAI Press, 2015)
- Tri Budiyono, *Hukum Dagang*, (Salatiga: Griya Media, 2010)
- Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2002)
- Gunawan widjaya, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008)
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Wahyu Kurniawan, *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Grafiti, 2012)
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta : Liberty, 2003)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009)

Jurnal

Luky Pangastuti, “Pertanggung Jawaban Pihak Personal Guarantee Yang Dinyatakan Pailit.” Jurnal Repertorium, ISSN:2355-2646, Volume II No. 2 , Juli - Desember 2015

John Duns, “Insolvency Law and Policy.” Oxford University Press, 2002

Atik Indriyani, “Aspek Hukum Personal Guaranty.” Jurnal Hukum Prioris, Volume 1, Nomor 1, September 2006

Kheriah, “Independen Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Hukum Kepailitan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, 2012

Ranitya Ganindha, Nadia Chairunnisa Purbo, Azahlia Umar, “Direksi Sebagai Penjamin Perorangan Dalam Hal Kepailitan Pada Perseroan Terbatas”. Jurnal Hukum Widya Yuridika, Volume 3, Nomor 2, Desember 2020

Internet

Umar Sidiq, “Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan”, (repository.iainponorogo.ac.id, 2019), halaman 12, <http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIA%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf>, diakses tanggal 29 September 2021, pukul 09.00 WIB.

Sofia Hasanah, “Batasan Dewan Komisaris Bisa Membantu Direksi dalam Perseroan”, (hukumonline.com, 6 April 2018), halaman 1, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ac5821fdecef/batasan-dewan-komisaris-bisa-membantu-direksi-dalam-perseroan/> diakses tanggal 22 September 2021, pukul 17.00 WIB.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

KUHPerdata